



2012-2017
REVIEW

RENCANA STRATEGIS



DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH

Jl. Twk. Hasyim Banta Muda No.4 Kp. Mulia Banda Aceh

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2012 – 2017 Dinas Pendidikan Dayah Aceh, disusun dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No.105 dan 108 Tahun 2000 serta Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999, Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut mewajibkan setiap instansi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya serta Pengelolaan Sumber Daya dan Kebijakanaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan kepada Renstra yang telah dibuatnya.

Dinas Pendidikan Dayah Aceh sebagai SKPA yang bersifat normatif dan berbasis masyarakat yang dibentuk oleh Gubernur Provinsi Aceh, untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam Bidang Dayah. Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya dimasa yang akan datang adalah sangat diharapkan. Mudah-mudahan Renstra 2012-2017 Dinas Pendidikan Dayah Aceh yang disusun dalam buku ini cukup realistis untuk dapat diimplementasikan.

Banda Aceh, 20 Februari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH

Dr. Bustami Usman, SH., SAP.,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19592131 198501 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.	1
1.2. Landasan hukum.	2
1.3. Maksud dan Tujuan.	3
1.4. Sistematika Penulisan.	3
BAB. II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPA.....	5
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
2.1.1 Tugas Pokok	6
2.1.2 Fungsi.....	6
2.1.3 Struktur Organisasi.....	7
2.1.4 Sumber Daya Dinas Pendidikan Dayah Aceh	8
2.1.4.1 Kepala Dinas.....	12
2.1.4.2 Sekretaris.....	12
2.1.4.3 Sub Bagian Umum.....	13
2.1.4.4 Subbagian Kepegawaian dan Tata Laksana.....	13
2.1.4.5 Subbagian Perencanaan dan Program.....	13
2.1.4.6 Subbagian Keuangan.....	13
2.1.4.7 Bidang Manajemen, Sarana dan Prasarana.....	13
2.1.4.8 Seksi Manajemen	14
2.1.4.9 Seksi Sarana.....	15
2.1.4.10 Bidang Pemberdayaan Santri.....	17
2.1.4.11 Seksi Pembinaan Santri	18
2.1.4.12 Seksi Pembinaan Kurikulum.....	18
2.1.4.13 Seksi Bimbingan dan Pengasuhan.....	18
2.1.4.14 Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia	19
2.1.4.15 Kelompok Jabatan Fungsional.....	21
2.2 Sumber Daya SKPA	21
2.3 Analisis Kondisi Eksternal Lingkungan Pendidikan Dayah.....	23
2.3.1 Ideologi	24
2.3.2 Sosial, Budaya dan Lingkungan	24
2.3.3 Ekonomi	26

2.3.4 Teknologi dan Informasi	29
2.3.5 Politik dan Keamanan	31
2.4. Permasalahan dan Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPA..	32
2.4.1. Permasalahan	33
2.4.2. Tantangan	34
BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	36
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Dayah.	36
3.2. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra	37
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis.	38
3.4. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah Terpilih	41
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.	47
BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	50
4.1. Visi Dan Misi Satuan Kerja Perangkat Aceh.	50
4.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Aceh.	51
4.3. Strategi Dan Kebijakan	51
A. Strategi	51
B. Kebijakan	52
BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.	54
5.1. Program dan Kegiatan SKPA.	54
5.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	54
5.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.....	55
5.1.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.....	56
5.1.4. Program Pendidikan Dayah	56
5.1.5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah	57
5.1.6. Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah	57
5.1.7. Program Pemberdayaan Santri	58
5.1.8. Program Pembinaan Manajemen Dayah	58
5.1.9. Program Penelitian dan Pengembangan Dayah	59
5.1.10. Program Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah.	60

BAB. VI	INDIKATOR KINERJA SKPA YANG MENGACU PADA	61
	TUJUAN DAN SASARAN RPJMA.....	
6.1.1.	Identifikasi dan verifikasi Dayah.....	62
6.1.2.	Pembinaan kelembagaan dan Perkembangan Dayah	62
6.1.3.	Pengembangan Pendidikan Dayah Kejuruan	62
6.1.4.	Pelatihan Pembina Kaligrafi.....	62
6.1.5.	Pelatihan Pembina Kaligrafi	63
6.1.6.	Pelatihan penulisan Arab – Melayu.....	63
6.1.7.	Pelatihan Komputer untuk Murid/Santri.....	63
6.1.8.	Pelatihan Penulisan Arab – Melayu	64
6.1.9.	Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah	64
6.1.10.	Pelatihan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris	64
6.1.11.	Pelatihan kompetensi Teungku dayah	65
6.1.12.	Pelatihan Life Skill	65
6.1.13.	Pembinaan Kurikulum dayah	65
6.1.14.	Pendidikan lanjutan bagi Tgk Dayah ke Luar Negeri.....	65
6.1.15.	Pembinaan minat, Bakat dan Kreativitas Murid.....	66
6.1.16.	Penyebarluasan dan Sosialisasi Program Dayah.....	66
6.1.17.	Penyediaan Alat bantu Proses Belajar Mengajar (PBM) di Dayah.....	66
6.1.18.	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah.....	66
BAB. VII	PENUTUP.	67
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.	
1.	Struktur Organisasi BPPD Aceh.	
2.	Indikasi Rencana Program Prioritas SKPA.	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pendidikan Dayah merupakan salah satu institusi dalam struktur organisasi Pemerintah Aceh yang bertugas untuk berusaha meningkatkan, memajukan dan mengembangkan taraf dan nilai kualitas pendidikan dayah.

Pemerintah Aceh pada Tahun 2007 membentuk sebuah wadah yang mampu mempertahankan dan mengembangkan dunia pendidikan Islam yaitu melalui Qanun nomor 5 tahun 2007 dengan nama Lembaga Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh (BPPD).

Pada Tahun 2016 adanya perubahan nama lembaga menjadi Dinas Pendidikan Dayah Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, dimana perangkat ini berdasarkan urusan pemerintahan atau fungsi penunjang urusan pemerintahan dan kekhususan Aceh yang meliputi urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan.

Kedudukan Dinas Pendidikan Dayah Aceh dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh pada pasal 4 ayat (1) dan (2) disebutkan:

1. Dinas Pendidikan Dayah Aceh merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah Aceh di bidang pelaksanaan pendidikan Dayah.
2. Dinas Pendidikan Dayah Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Tugas yang diemban oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh sebagaimana tersebut dalam pasal 5 yaitu melaksanakan tugas

umum dan khusus Pemerintahan Aceh dan pembangunan bidang pelaksana pendidikan dayah dan secara khusus pada pasal 6 disebutkan yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pendidikan dayah terpadu dan salafiah, santri, sumber daya manusia, manajemen, sarana dan prasarana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis tahun 2012-2017 Dinas Pendidikan Dayah Aceh adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang merupakan aturan pelaksanaan dari PP nomor 8 Tahun 2008;
5. Surat Edaran Mendagri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJM Daerah;
6. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2010, Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2012-2017;
7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan Rencana Strategis SKPA Tahun 2012-2017 Dinas Pendidikan Dayah Aceh adalah menyusun dokumen rencana kerja strategis Dinas Pendidikan Dayah Aceh untuk kurun waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pendidikan dayah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis adalah agar Rencana Strategis ini dapat dipakai sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012-2017, sesuai dengan jumlah pagu indikatif yang telah di usulkan sebagaimana yang tertuang dalam lampiran Rencana Strategis ini.

Rencana Strategis ini menjadi Tugas dan Kegiatan serta Pertanggung Jawaban Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh.

1.4. Sistematika Penulisan.

Sistematika Penulisan Renstra ini berdasarkan pada :

BAB I : PENDAHULUAN.

- 1.5. Latar Belakang.
- 1.6. Landasan hukum.
- 1.7. Maksud dan Tujuan.
- 1.8. Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPA.

- 2.1. Struktur organisasi SKPA.
- 2.2. Tugas Pokok dan Fungsi.
- 2.3. Sumber Dayah SKPA.
- 2.4. Permasalahan dan Tantangan Pengembangan Pelayanan.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPA.
- 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.
- 3.4 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
- 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI
DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi SKPA
- 4.2. Tujuan dan sasaran Jangka menengah SKPA
(*Tabel terlampir*)
- 4.3. Strategi dan kebijakan SKPA

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPA YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMA.

VII : P E N U T U P

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPA

Pelayanan SKPA memuat gambaran umum informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPA dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Aceh. Gambaran tersebut mengulas secara ringkas tentang sumberdaya yang dimiliki SKPA dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPA periode sebelumnya, merinci capaian program prioritas SKPA yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi serta hal-hal lainnya dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPA ini.

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan dan Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan Dayah Aceh sebagai salah satu SKPA Pemerintah Aceh, dalam melaksanakan amanat Undang-undang untuk pelaksanaan pembangunan pada Sektor Pendidikan perpedoman pada Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan dalam Qanun No.5 Tahun 2007. Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Dayah Aceh sebagai salah satu SKPA Pemerintah Aceh dapat dijabarkan sebagai berikut:

2.1.1. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Pendidikan Dayah Aceh adalah ***”Melaksanakan Tugas-Tugas Umum Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Pembinaan Pendidikan Dayah”***.

2.1.2. Fungsi

Terkait dengan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan Dayah Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Urusan ketatausahaan Badan;
- b. Penyusunan Program kerja Tahunan, Jangka Menengah dan Jangka Panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pembinaan Pendidikan Dayah;
- d. Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di Bidang Pendidikan Dayah;
- e. Penyiapan rancangan Qanun dan produk hukum di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah;
- f. Pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran;
- g. Pelaksanaan fasilitasi usaha ekonomi produktif bagi santri dan pimpinan dayah;
- h. Pelaksanaan fasilitas kesejahteraan tenaga pengajar;
- i. Pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya santri dayah;
- j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dayah;
- k. Pembinaan kurikulum pendidikan dayah;
- l. Pelaksanaan fasilitasi kualitas tenaga-tenaga pendidik;
- m. Pembinaan UPTD; dan
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pendidikan dayah.

2.1.3. Kewenangan

Dinas Pendidikan Dayah Aceh sebagai salah satu SKPA di Pemerintahan Aceh memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan dayah serta menambah materi muatan lokal;
- b. Mengembangkan dan mengatur lembaga pendidikan dayah;
- c. Menetapkan kebijakan tentang penerimaan santri dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu;
- d. Menyediakan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan dayah;
- e. Membantu penyelenggaraan pendidikan dayah yang meliputi pembinaan kurikulum, akreditasi dan fasilitasi kesejahteraan tenaga pengajar;
- f. Menyelenggarakan pelatihan, penataran dan kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas tenaga pengajar;
- g. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan dan pengajaran dayah;
- h. Melaksanakan inventarisasi asset dan keberadaan lembaga dayah; dan
- i. Mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang pendidikan dayah.

Dari Tugas dan Fungsi dan kewenangan Dinas Pendidikan Dayah Aceh tersebut jelaslah bahwa Dinas Pendidikan Dayah Aceh memiliki peran yang strategis dalam pembangunan pendidikan dayah

di Aceh, khususnya dalam pengembangan sistem dan peningkatan mutu pendidikan dayah.

2.1.4. Struktur Organisasi SKPA

Di dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh dinyatakan bahwa Dinas Pendidikan Dayah Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di Bidang Pendidikan Dayah yang berada di bawah Gubernur. Secara hierarki Dinas Pendidikan Dayah Aceh dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Dayah Aceh disusun secara sistematis yang efektif dari tugas dan efesien dari segi fungsi. Secara hierarki Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh membawahi 1 Sekretariat Dinas Pendidikan Dayah Aceh, 3 Bidang, 1 Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD). Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, Bidang dipimpin oleh masing-masing kepala bidang, UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD. Secara umum struktur organisasi Dinas Pendidikan Dayah Aceh disusun sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat Badan;
 - Sub Bagian Umum Hubungan Masyarakat;
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Manajemen, Sarana dan Prasarana;
 - Seksi Manajemen
 - Seksi Sarana
 - Seksi Prasarana
4. Bidang Pemberdayaan Santri;
 - Seksi Pembinaan Santri
 - Seksi Pembinaan Kurikulum
 - Seksi Bimbingan dan Pengasuhan
5. Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - Seksi Pengkaderan
 - Seksi Kesejahteraan
 - Seksi Kerjasama Antar Lembaga
6. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTD);

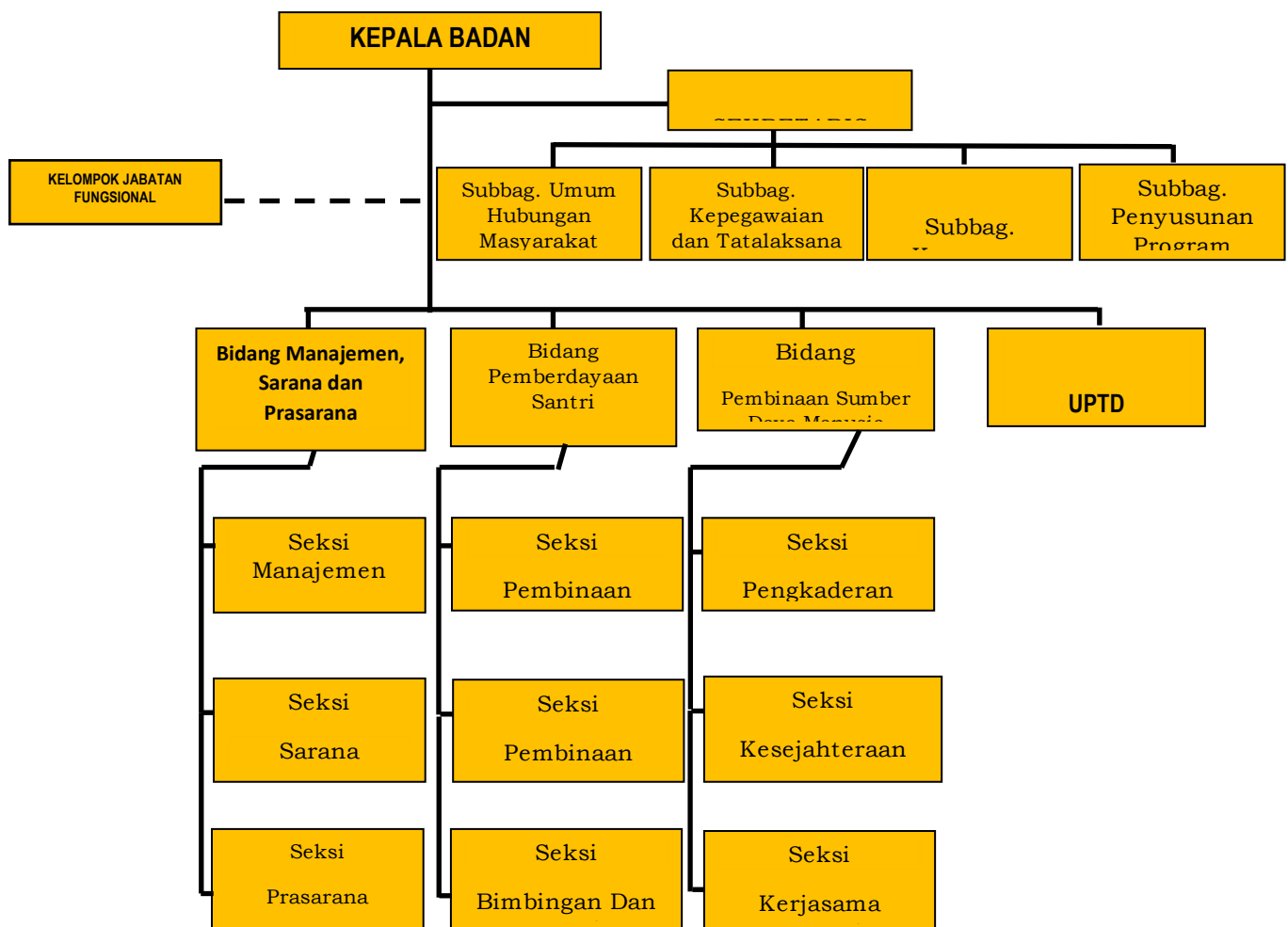
Secara umum struktur organisasi Dinas Pendidikan Dayah

Aceh disusun sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Kepala Dinas | : 1 Orang |
| 2. Sekretariat Dinas | : 1 Orang |
| 3. Bidang Manajemen, Sarana | |

- Dan Prasarana : 1 Orang
4. Bidang Pemberdayaan Santri : 1 Orang
5. Bidang Pembinaan Sumber
Daya Manusia : 1 Orang
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTB) : 1 Orang

Gambaran mengenai struktur organisasi SKPA Dinas Pendidikan Dayah Aceh sesuai Pergub Aceh Nomor 132 Tahun 2016 dapat dilihat pada Bagan 2.1 berikut:



Struktur organisasi Dinas Pendidikan Dayah Aceh tersebut disusun secara sistematis, efektif yang dijabarkan sesuai dengan tugas masing-masing pemangku jabatan yang disusun secara efektif dan efisien. Tugas masing-masing pemangku jabatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.4.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dan melaksanakan tugas umum dan khusus pemerintahan bidang pendidikan dayah terpadu dan salafiah, santri, sumber daya manusia, manajemen, sarana dan prasarana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2.1.4.2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan Perencanaan, Penyusunan program, administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data, perencanaan, penyusunan program kegiatan, evaluasi, monitoring dan pelaporan

- c. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan informasi, hubungan masyarakat;
- d. pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dayah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4.3. Sub Bagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan.

2.1.4.4. Subbagian Kepegawaian dan Tata Laksana

Subbagian Kepegawaian dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan.

2.1.4.5. Subbagian Perencanaan dan Program

Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program, hubungan masyarakat, data, informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2.1.4.6. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan keuangan dan pengelolaan aset.

2.1.4.7. Bidang Manajemen, Sarana dan Prasarana

Bidang Manajemen, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan pelaksanaan fasilitasi di bidang pembinaan manajemen dayah terpadu dan salafiyah serta fasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Manajemen, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis penerapan manajemen pada dayah terpadu dan salafiyah;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyediaan, pemeliharaan asset dan pengembangan sarana pada dayah terpadu dan salafiyah;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyediaan, pemeliharaan asset dan menyusun kebutuhan mobilier pada dayah terpadu dan salafiyah;
- d. pelaksanaan fasilitasi penerapan manajemen pada dayah terpadu dan salafiyah;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pembinaan manajemen; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dayah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4.8. Seksi Manajemen

Seksi Manajemen mempunyai tugas :

- a. melakukan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis penerapan manajemen pada dayah terpadu dan salafiyah;
- b. melakukan sosialisasi, penyuluhan tentang penerapan manajemen dayah yang profesional;
- c. menyiapkan tugas evaluasi terhadap program pembangunan dayah;
- d. menyiapkan data instrumen manajemen dilingkungan dayah;
- e) menyusun pengelolaan manajemen dan struktur pengurus dayah;
- f) melaksanakan pembinaan manajemen dan pengelolaan dayah;
- g) melaksanakan evaluasi tentang tata kelola dan manajemen dayah.

2.1.4.9. Seksi Sarana

Seksi Sarana mempunyai tugas:

- a. melakukan penyediaan kitab/buku pendidikan dayah dan alat peraga santri yang dibutuhkan dayah salafiyah dan terpadu;
- b. melakukan penyediaan mobileir dayah;
- c. melaksanakan sosialisasi tentang pedoman perencanaan, tata cara pengusulan, pelaksanaan, pelaporan pengelolaan sarana dayah;

- d. mengusulkan, menetapkan dan memproses penyediaan sarana dayah;
- e. melaksanakan analisis data sarana dayah;
- f. menyusun instrumen pengumpulan dan pengolah data sarana dayah;
- g. mengatur pengolahan data inventaris sarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- h. melaksanakan pelayanan administrasi inventaris sarana dayah.

Seksi Prasarana mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyediaan dan pengembangan pembangunan dayah serta pemeliharaan Asset;
- b. melaksanakan sosialisasi tentang pedoman perencanaan, tata cara pengusulan, pelaksanaan, pelaporan pengelolaan prasarana dayah;
- c. mengusulkan, menetapkan dan memproses penyediaan prasarana dayah;
- d. melaksanakan analisis data prasarana dayah;
- e. menyusun instrumen pengumpulan dan pengolah data prasarana dayah;
- f. mengatur pengolahan data inventaris prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

- g. melaksanakan pelayanan administrasi inventaris prasarana dayah.

2.1.4.10. Bidang Pemberdayaan Santri

Bidang Pemberdayaan Santri merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan santri. Bidang Pemberdayaan Santri mempunyai tugas melakukan fasilitasi pembinaan, pemberdayaan, pengembangan santri, bimbingan dan pengasuhan serta pembinaan kurikulum dayah terpadu dan salafiyah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Pemberdayaan Santri mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis pembinaan santri dan pembinaan kurikulum serta bimbingan dan pengasuhan;
- b. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis penerapan manajemen bimbingan dan sistem pengasuhan santri pada dayah terpadu dan salafiah;
- c. pelaksanaan fasilitasi pembinaan, pemberdayaan, bimbingan dan pengasuhan serta pengembangan santri dayah terpadu dan salafiyah;
- d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kurikulum dayah terpadu dan salafiyah;
- e. pelaksanaan fasilitasi bantuan pendidikan bagi santri terpadu dan salafiyah; pelaksanaan fasilitasi penerapan

bimbingan dan pengasuhan pada dayah terpadu dan salafiah;

- f. pelaksanaan fasilitasi penerapan manajemen bimbingan dan pengasuhan santri pada dayah terpadu dan salafiah;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan santri; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dayah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4.11. Seksi Pembinaan Santri

Seksi Pembinaan Santri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan santri serta bantuan pendidikan bagi santri dayah terpadu dan salafiyah.

2.1.4.12. Seksi Pembinaan Kurikulum

Seksi Pembinaan Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kurikulum dayah terpadu dan salafiyah; dan

2.1.4.13. Seksi Bimbingan dan Pengasuhan

Seksi Bimbingan dan Pengasuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi bimbingan dan pengasuhan santri pada dayah terpadu dan salafiah.

2.1.4.14. Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia

Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengkaderan, kesejahteraan, dan kerjasama antar lembaga. Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia, pengkaderan teungku dayah, kerjasama antar lembaga, peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar dan pengembangan usaha ekonomi produktif dayah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis peningkatan sumber daya pengurus dan tenaga pendidik;
- b. pelaksanaan fasilitasi peningkatan sumber daya pengurus dan tenaga pendidik;
- c. pelaksanaan fasilitasi pengkaderan dan pengurus dayah
- d. pelaksanaan fasilitasi kerjasama pemberdayaan dibidang pembinaan sumber daya pengurus dan tenaga pendidik;
- e. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kesejahteraan pimpinan dan tenaga pendidik;
- f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi produktif pada dayah;

- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga lainnya di bidang pembinaan sumber daya pengurus dan tenaga pendidik; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dayah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengkaderan mempunyai tugas:

- a. Memfasilitasi pengkaderan sumber daya pengurus dan tenaga pendidik;
- b. Melakukan kaderisasi terhadap pengurus dan tenaga pendidik;
- c. Memfasilitasi pengkaderan sumber daya pengurus dan tenaga pendidik terpencil; dan
- d. Melakukan kaderisasi terhadap pengurus dan tenaga pendidik terpencil.

Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas :

- a. Memfasilitasi peningkatan kesejahteraan pimpinan dan tenaga pendidik;
- b. Memfasilitasi peningkatan kesejahteraan ulama dayah; dan
- c. Memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi produktif dayah.

Seksi Kerjasama Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas:

- a. Melakukan kerjasama hubungan dibidang pembinaan

sumber

- b. daya pengurus dan tenaga pendidik;
- c. Memfasilitasi kerjasama antar organisasi dayah;
- d. Memfasilitasi pengembangan dayah dengan lembaga lain; dan
- e. Memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dayah.

2.1.4.15. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud tersebut, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya SKPA

Sumber Daya yang dimiliki Dinas Pendidikan Dayah Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal yang masih operasional. Sumber daya

Dinas Pendidikan Dayah Aceh yang masih aktif dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah PNS Berdasarkan
Jenis Kelamin

N o	Jabatan	Kadis/Sekr/Kabid Kasi/Kasubbag		Staf	
		L	P	L	P
1	2	4	5	7	8
1.	Kepala Badan	1			
2.	Sekretariat				
	Sekretaris	1			
	Subbag. Umum Hubungan Masyarakat		1	2	2
	Subbag. Kepegawaian & Tata Laksana		1		3
	Subbag. Keuangan	1		1	4
	Subbag Penyusunan Program	1		1	1
3.	Bidang Manajemen, Sarana Dan Prasarana				
	Kepala Bidang Manajemen, Sarana Dan Prasarana	1			
	Seksi Manajemen	1		1	
	Seksi Sarana	1		1	1
	Seksi Prasarana	1		2	
4.	Bidang Pemberdayaan Santri				
	Kepala Bidang Pemberdayaan Santri	1			
	Seksi Pembinaan Santri	1		1	
	Seksi Pembinaan Kurikulum	1			1
	Seksi Bimbingan dan Pengasuhan	1		1	1
5.	Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia				
	Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia	1			
	Seksi Pengkaderan	1		1	
	Seksi Kesejahteraan	1		1	
	Seksi Kerjasama Antar Lembaga	1		1	

6.	UPTD				
	Kepala UTPD	1			
	Kepala Tata Usaha	1		1	1
	Kepala Sarana & Prasarana Pelatihan	1		1	
	Kepala Kegiatan Keagamaan	1			1
	Jumlah				
	Jumlah Total Pegawai	20	2	15	15

Sumber Data : Bagian Kepegawaian BPPD Aceh, Desember 2016

2.3. Analisis Kondisi Eksternal Lingkungan Pendidikan Dayah.

Kondisi perubahan yang dialami dunia saat ini akibat pengaruh globalisasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan informasi yang terjadi sangat cepat mengharuskan Pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Pendidikan Dayah Aceh harus berkerja keras dalam menyerap semaksimal mungkin dampak positif perubahan tersebut dan mengantisipasi secara dini dampak negative perubahan ang terjadi.

Metode dan pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan pembangunan pendidikan dayah di Aceh harus mempertimbangkan berbagai aspek external yang terjadi. Aspek-aspek eksternal yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dayah di Aceh antara lain adalah:

1. Ideologi
2. Sosial, Budaya dan Lingkungan
3. Ekonomi

4. Teknologi dan Informasi

5. Politik dan Keamanan

2.3.1. Ideologi

Provinsi Aceh secara geografis berada pada posisi paling barat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penduduk Provinsi Aceh Mayoritas Penduduk memeluk agama Islam dengan kekhususan pemberlakuan Syariat Islam bagi pemeluknya. Pemberlakuan Syariat Islam di Provinsi Aceh didasarkan pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Untuk mendukung pemantapan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT melalui pendidikan keagamaan. Pada Tahun 2011 tercatat di Provinsi Aceh terdapat hampir 6.560 buah Dayah/Pesantren, 5.350 buah di antaranya adalah Pondok Pesantren sedangkan sisanya adalah Balai Pengajian (di Aceh disebut Balee Seumeubeut)

Pemberlakuan syariat Islam Di Provinsi Aceh menjadi penyelaras dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan dayah di Provinsi Aceh sehingga pembangunan manusia di provinsi ini menjadi insan yang bertakwa kepada Allah SWT dan memiliki kepribadian luhur yang berlandaskan Islam.

2.3.2. Sosial, Budaya dan Lingkungan

Sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang berada diujung kepulauan Indonesia, Provinsi Aceh merupakan pintu gerbang akses untuk Indonesia di masa silam. Sebagai Pintu gerbang

dan jalur perdagangan serta asimilasi sosial yang terjadi, percampuran adat, budaya dan karakter yang terjadi di Provinsi Aceh merupakan satu kesatuan unik sebagai modal pembangunan Aceh. Percampuran dan pembauran budaya dan sosial ini menciptakan banyak potensi keragaman budaya yang menarik. Terdapat delapan sub etnik yang mendiami berbagai kawasan di Provinsi ini dengan budaya dan bahasa daerah yang berbeda satu sama lain. Ke delapan sub etnik tersebut adalah Suku Aceh, Gayo, Alas, Aneuk Jamee, Simeulue, Kluet, Singkil, dan Tamiang. Suku Gayo dan Alas mendiami dataran tinggi di kawasan Aceh Tengah, Aceh Tenggara dan Gayo Lues, sementara suku-suku lainnya mendiami kawasan pesisir pantai Utara, Timur, Barat, Selatan dan kepulauan.

Keberagaman adat istiadat dan karakter yang ada di Provinsi Aceh ini menciptakan kearifan lokal - kearifan lokal (*local wisdoms*) yang tetap dijaga dan di terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kearifan tersebut menjadi suatu warna yang dinamis dalam tatanan kehidupan masyarakat di Aceh. Kearifan tersebut menjadi salah satu tameng dalam menjaga kultur dan tatanan kehidupan Islami yang tercipta selama ini tetap terjaga.

Objek wisata budaya yang memiliki kualitas budaya yang memikat yang ada di daerah ini antara lain seperti Mesjid Raya Baiturrahman, Taman Sari Gunongan, Kherkhoff, Makam Syiah

Kuala, Lonceng Cakra Donya, dan berbagai tempat bersejarah lainnya. Lokasi dan panorama eksotis yang tercipta di Provinsi ini seperti Pantai Iboih di Sabang (Pulau Weh), Taman Nasional Gunung Lauser, merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang sering dikunjungi wisatawan baik lokal maupun manca negara.

2.3.3. Ekonomi.

Jika dihitung atas harga konstan, perkembangan PDRB perkapita Aceh selama periode 2007-2011 tidak jauh berbeda dengan perkembangan PDRB Aceh secara keseluruhan, baik dengan migas maupun tanpa migas (secara terinci dapat dilihat pada **Tabel 2.14**). Selamatahun 2007-2010 terus mengalami penurunan terutama dipengaruhi oleh menurunnya kontribusi migas. Pada tahun 2007 PDRB perkapita Aceh adalah sebesar Rp. 8,52 juta terus menurun menjadi Rp. 7,37 juta di tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2011 sedikit mengalami peningkatan menjadi Rp. 7,59 juta, namun masih lebih kecil jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2007. Kondisi ini pun masih jauh dibawah rata rata nasional yang mencapai Rp. 9,25 juta pada tahun 2011.

Sedangkan tanpa memperhitungkan migas, nilai PDRB Aceh perkapita atas dasar harga konstan memperlihatkan perkembangan yang meningkat setiap tahunnya yaitu dariRp. 6,16 juta (2007) meningkat menjadi Rp. 6,72 (2011). Walaupun

peningkatannya tergolong lamban, namun perkembangan sektor-sektor nonmigas Aceh telah memberiharapan yang baik terhadap peningkatan PDRB perkapita, dan tersebut dapat terjadi karena angka pertumbuhan PDRB nonmigas lebih besar dari angka pertumbuhan penduduk. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang, pertumbuhan sektor-sektor nonmigas di Aceh ke depan perlu terus didorong agar dapat meningkat lebih tinggi, terutama sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dan memiliki nilai tambah yang besar bagi masyarakat.

Tabel 2
PendapatanPerkapita Aceh 2007-2011
BerdasarkanHargaKonstan

(Rp. 000,-)

PEND APATA N PERKA PITA	TAHUN				
	2007	2008	2009	2010	2011
PDRB Migas (Rp)	35. 983. 090. 790.	34. 097. 992. 470	32.219. 086.319. 415	33.118 .170.547 .757	34.779 .702.729 .176
PDRB Non Migas (Rp)	26. 022. 200. 960.	26. 523. 093. 380	27.547 .794.892 .128	29.089. 351.224. 606	30.801 .676.451 .896
Jumla hPend uduk (Jiwa)	4.22 3.83 3	4.2 93.9 15	4.363. 477	4.494. 410	4.584. 298 *
Penda patanP erkap Migas (Rp)	8.51 9,06 0	7.9 41,0 03	7.383. 810	7.368. 747	7.586. 702
Penda patanP erkap Non Migas (Rp)	6.16 0.80 2	6.1 76.9 02	6.313. 266	6.472. 340	6.718. 952

*) angkaperkiraansementara

Sumber: BPS, 2012 (data olahan)

Jika dihitung atas dasar harga berlaku, bahwa nilai PDRB Aceh perkapita dengan migas walaupun perkembangannya setiap tahun fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh kontribusimigas, namun secara umum mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 16,83 juta pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp. 18,66 juta. Kondisi tersebut juga masih dibawah rata-rata nasional yang telah mencapai sekitar Rp 20,00 juta perkapita. Sedangkan tanpa migas, menunjukkan perkembangan yang cukup baik, pada tahun 2007 nilainya sebesar Rp. 11,77 juta perkapita dan meningkat menjadi Rp. 15,94 juta pada tahun 2011, atau rata-rata setiap tahunnya meningkat sebesar Rp 1,04 juta. Perkembangan PDRB Aceh per kapita atas dasar harga berlaku baik dengan migas maupun tanpa migas, secara terperinci selama periode 2007-2011 dapat dilihat pada **Tabel. 2.15**.

Jika PRDB perkapita dianalisa berdasarkan sektor-sektor, maka masih terjadi ketimpangan yang mencolok antara sektor pertanian dengan sektor-sektorlainnya. Dengan asumsi bahwa masyarakat yang menggantungkanekonominyakepadapertaniansekitar 55 persen, maka PDRB perkapita atas dasar harga berlaku sektor pertanian pada tahun 2011 adalah sebesar hanya Rp 10,41 juta. Sedangkan rata-rata secara keseluruhan adalah Rp 18,66 juta perkapita. Oleh karenanya, dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan yang masih tinggi di wilayah pedesaan dan juga identik dengan petani/nelayan, maka pada masa yang

akan datang pembangunan sector pertanian (pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan) harus menjadi prioritas, terutama dari sisi produktivitas dan nilai tambah yang diperoleh.

Tabel 2.15
PendapatanPerkapita Aceh 2007-2011
BerdasarkanHargaBerlaku

PEND APAT AN PERK APITA	TAHUN				
	2007	2008	2009	2010	2011
PDRB Migas (Rp)	71.09 3.359. 398.7 40	73.54 7.550. 715.4 38	71.98 6.953. 996.3 37	77.98 3.775. 688.4 57	85.53 7.965. 914.9 29
PDRB Non Migas (Rp)	49.71 8.173. 075.2 67	54.20 9.880. 047.0 35	58.90 7.781. 775.8 90	65.08 7.894. 983.3 14	71.65 7.715. 895.0 23
Juml ahPe ndud uk (Jiwa)	4,223, 833	4,293, 915	4,363, 477	4,494, 410	4.584. 298 *
Pend apata nPerk ap Migas (Rp)	16.83 1.479	17.12 8.320	16.49 7.613	17.35 1.282	18.65 8.902
Pend apata nPerk ap Non Migas (Rp)	11.77 0.866	12.62 4.814	13.50 0.193	14.48 1.966	15.94 3.742

*) angkaperkiraansementara

Sumber: BPS, 2012 (data olahan)

2.3.4. Teknologi dan Informasi

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Infomasi yang begitu pesat ikut mengubah tatanan kehidupan di Provinsi Aceh. Kemajuan Ilmu pengetahuan yang memiliki dua sisi yang kontras, sisi

positif adalah kebutuhan dari kemajuan ilmu pengetahuan tersebut sebagai kebutuhan yang mutlak untuk memenuhi kebutuhan dalam keseharian dan sisi negatif yang merusak pada sisi lainnya. Pemanfaatan sisi positif ilmu pengetahuan yang maksimal mendukung dalam pembangunan manusia di Provinsi Aceh dalam hal tanggap kemajuan teknologi. Dengan Kemajuan dan tingkat kompetisi sumber daya manusia yang semakin meningkat serta dengan globalisasi dunia yang hampir tanpa batas menciptakan pertarungan sumber daya yang sangat tinggi memasuki sisi kehidupan dalam lingkungan dayah. Teknologi yang dikuasai oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan agamis menjadikan teknologi tersebut hal yang bermanfaat dan memiliki kemaslahatan untuk umat manusia. Pada sisi lain ilmu pengetahuan yang memiliki sisi negatif dengan pengguna sumber daya manusia yang tidak kurang mampu dalam memahami kegunaan teknologi dan memiliki kedangkalan akidah menjadikan ilmu pengetahuan tersebut menjadikan hal yang sangat menakutkan bagi generasi selanjutnya.

Penerapan dan penyebaran penguasaan Teknologi dan informasi terkini pada seluruh kabupaten/kota sehingga tidak terjadi disparitas antar kabupaten/kota. Pembelajaran interaktif dan pengenalan *internet sehat* pada tingkat pendidikan dasar di lingkungan dayah menjadi sangat penting

untuk mencapai tingkat kompetisi sumber daya manusia yang tanggap teknologi. Penggunaan metode-metode pembelajaran yang tepat dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi akan dilaksanakan merata dalam jangka 5 tahun mendatang dalam lingkungan dayah/pesantren.

2.3.5. Politik dan Keamanan

Kondisi Politik dan keamanan yang kondusif dan stabil menciptakan ruang dan suasana pendidikan dayah yang kondusif dan produktif untuk pelaksanaan pembangunan pendidikan dayah di Aceh. Akibat situasi politik dan kondisi keamanan yang tidak stabil dimasa lalu menjadikan pembangunan pendidikan dayah di Provinsi Aceh menjadi tertinggal dan terbelakang dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Akibat kondisi yang tidak stabil di masa lalu menjadi harga yang harus dibayar mahal oleh seluruh masyarakat Aceh dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Upaya yang sangat keras dan biaya yang sangat mahal untuk membuat mutu pendidikan dayah khususnya di Provinsi Aceh bisa sejajar dengan bahkan didepan provinsi lain di Indonesia yang sudah lebih maju.

Pencapaian hasil pembangunan pendidikan dayah seperti yang direncanakan akan terlaksana dengan jaminan keamanan yang terpelihara. Suasana politik dan keamanan yang kondusif

menciptakan kenyamanan setiap insan pendidikan di lingkungan dayah dalam melaksanakan tugas dan menerima hasil pendidikan dayah di Provinsi Aceh. Dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah (1) Kestabilan politik dan keamanan yang menjadikan suasana kondusif kehidupan bermasyarakat, (2) Kebutuhan pendidikan politik untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, (3) Implementasi otonomi daerah yang mendorong kemandirian dan berkembangnya kearifan lokal, (4) Keterlambatan penerbitan turunan peraturan perundangan yang berdampak pada bidang pendidikan dayah, (5) Ideologi negara sebagai pemersatu bangsa dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan (6) Komitmen pemenuhan pendanaan pendidikan umum yang minimal 20 % dari ABPD, lebih khusus lagi pada pendidikan dayah sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (4).

2.4. Permasalahan dan Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPA.

Pelaksanaan pembangunan pendidikan di Provinsi Aceh yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, Dinas Pendidikan Dayah Aceh telah menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Permasalahan dan tantangan tersebut menciptakan motivasi tersendiri untuk memecahkan permasalahan dan tantangan tersebut untuk

kemajuan pendidikan di Provinsi Aceh dan peningkatan kualitas generasi penerus di Provinsi Aceh.

2.4.1. Permasalahan.

Permasalahan-permasalahan pendidikan dayah yang dihadapi selama ini dinilai sangat banyak dan kompleks. Permasalahan-permasalahan utama tersebut dapat diuraikan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat yang masih rendah terhadap pendidikan dalam lingkungan dayah dan tidak merata antar kabupaten/kota;
2. Tenaga Pendidik dalam lingkungan dayah secara kualitas dan kuantitas yang masih kurang bila dibandingkan dengan tenaga pendidik pada pendidikan formal pada umumnya;
3. Sarana dan Prasarana dayah yang masih belum memadai;
4. Database jumlah dayah masih belum lengkap dan akurat;
5. Tingkat Pendidikan para pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan dayah masih berasal dari lingkungan dayah sendiri;
6. Lembaga Pendidikan Dayah belum berjalan sesuai dengan standar pendidikan pada umumnya;
7. Alokasi dana bantuan operasional dayah masih belum merata sebagaimana pendidikan formal lainnya;
8. Rendahnya minat warga atau masyarakat untuk belajar dan menuntut ilmu di lingkungan dayah;

9. Manajemen dan pelayanan dayah belum adanya sistem pelayanan dan informasi yang terpadu dalam memberikan pelayanan bagi *stake holder* untuk pendidikan dayah;
10. Perencanaan Pendidikan Dayah belum terkoordinasi dengan baik;
11. Kualifikasi dan kompetensi guru dayah yang belum terkoordinasi dengan baik;
12. Keterbatasan sarana dan prasarana dayah;
13. Pembangunan sarana dan prasarana dayah yang belum merata;
14. Lokasi Pembangunan Dayah yang jauh dari pemukiman akibat tidak tersedianya lahan;
15. Belum optimalnya sistem Akreditasi Dayah;
16. Kesejahteraan Guru Dayah yang belum merata dan belum terlalu baik bila dibandingkan dengan guru-guru pada pendidikan lain.
17. Pengalaman Pendidikan berbasis islami yang masih setengah hati.

2.4.2. Tantangan

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) Aceh khususnya sumber daya manusia di lingkungan dayah menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Namun jika dikomparasikan dengan pencapaian rata-rata nasional, kualitas SDM Aceh yang direpresentasikan dengan

indeks pembangunan manusia (IPM) masih lebih rendah dari IPM nasional. kualitas SDM sangat menentukan untuk dapat bersaing dalam era globalisasi. Daya saing SDM Aceh masih tergolong rendah yang dicirikan dengan masih terbatasnya jumlah lulusan SDM kejuruan yang membidangi ke khususnya dayah yang memiliki keterampilan (*skill*), jumlah tenaga kerja yang berpendidikan tinggi bidang agama masih rendah dan rasio ketergantungan penduduk usia produktif dengan jumlah penduduk masih tinggi. Berdasarkan laporan Aceh Dalam Angka Tahun 2012 nilai IPM Provinsi Aceh berada pada urutan 18 dari 33 Provinsi.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Dayah Aceh

Dewasa ini dayah dihadapkan pada banyak tantangan, termasuk di dalamnya dorongan untuk memodernisasi pendidikan dayah. Dewasa ini dalam banyak hal Sistem dan kelembagaan dayah telah bergerak ke arah modernisasi dan disesuaikan dengan tuntutan reformasi, terutama dalam aspek kelembagaan yang secara Otomatis akan mempengaruhi penetapan kebijakan yang mengacu pada tujuan institusional lembaga tersebut. Selanjutnya, persoalan yang muncul adalah apakah dayah dalam menentukan sebuah kebijakan harus melebur pada tuntutan zaman sekarang, atau justru ia harus mampu mempertahankannya sebagai ciri khas dayah yang banyak hal justru lebih mampu mempertahankannya sebagai ciri khas dayah yang banyak hal justru lebih mampu mengaktualisasikan eksistensinya di tengah-tengah tuntutan masyarakat.

Sangat kita sayangkan, lembaga pendidikan dayah yang merupakan kebanggaan masyarakat Aceh pada masa lalu, dalam perkembangan saat ini menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. Termarginalnya lembaga pendidikan dayah disebabkan oleh banyak hal, baik dari masyarakat maupun dari

pemerintah. Hal ini terjadi karena keterbatasan lembaga dayah seperti:

1. Belum adanya kurikulum pendidikan yang baku.
2. Keterbatasan jumlah dan mutu tenaga pengajar.
3. Pengelolaan manajemen dayah yang tradisional.
4. Kurangnya dukungan sarana dan fasilitas dayah.
5. Terbatasnya jumlah mutu santri yang dihasilkan.
6. Terbatasnya hubungan dayah dengan dunia luar.
7. Terbatasnya dana operasional dayah.

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.

Renstra merupakan acuan kerja SKPA dalam melaksanakan tugas fungsi dalam jangka 5 (lima) Tahunan yang merumuskan Program dan kegiatan Pembangunan di Bidang Pelaksanaan Pembinaan dan Pendidikan Dayah. Renstra Dinas Pendidikan Dayah Aceh yang menurut Program dan Kepala Badan untuk jangka 5 (Lima) Tahun, dibuat secara fleksible dalam aturan pengadaan kegiatannya disesuaikan dengan perkembangan masa selama waktu yang dibutuhkan. Namun dalam rentang waktu berjalan program dan kegiatan yang tidak terakomodasi sepenuhnya dalam Rencana Tahunan. Hal ini mengingat adanya Program yang di Prioritaskan dan tergantung kemampuan keuangan Daerah.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis.

Isu Kritis yang dihadapi oleh lembaga pendidikan dayah meliputi marginalisasi struktural baik dari masyarakat maupun dari pemerintah yaitu:

a. Kurikulum

Persoalan mendasar yang dihadapi dayah yaitu kurikulum. Penyelenggaraan pendidikan dayah selama ini tanpa adanya kurikulum standar. Ketidadaan kurikulum standar mengakibatkan penyelenggaraan pendidikan dayah antara satu dengan lain berbeda. Terjadinya perbedaan tersebut sebagai akibat dari adanya hak otoritas mutlak dari Teungku Chik (Pimpinan dayah) dayah bersangkutan. Untuk itu, perlu penyusunan kurikulum standar minimal sebagai rujukan bagi setiap penyelenggara pendidikan dayah. Penyusunan Kurikulum diarahkan ke dalam tiga model kurikulum, yaitu :

1. Kurikulum inti
2. Kurikulum kekhususan
3. Muatan lokal

b. Tenaga Pengajar

Tenaga pengajar pada lembaga pendidikan dayah pada umumnya bersumber dari dayah itu sendiri. Tenaga pengajar ini diangkat dari alumni dayah yang bersangkutan sehingga proses belajar mengajar relatif tidak berkembang.

Hal ini karena tidak adanya transformasi ilmu dan wawasan dari pengajar yang berasal dari luar lingkungan dayah dan atau dari luar negeri.

c. Manajemen

Manajemen dayah masih bersifat tradisional karena pengelolaan dayah sangat ditentukan oleh pimpinan dayah secara personal. Keadaan ini tentunya akan menyulitkan bagi lembaga tersebut untuk berkembang, terutama setelah pimpinan pertama (pendiri/pemilik) meninggal dunia. Sistem manajemen dayah yang dilaksanakan selama ini tergolong kurang baik ditinjau dari sisi penyelenggara pendidikan. Akibatnya, proses penyelenggaraan dayah yang tidak dilandasi oleh manajemen modern berpengaruh secara langsung terhadap keberlangsungan pendidikan di dayah dalam jangka panjang.

d. Sarana dan prasarana dayah

Dalam kondisi yang sangat sederhana, performansi dayah relatif lebih rendah dibandingkan dengan lembaga pendidikan formal lainnya karena belum didukung oleh berbagai fasilitas utama dan penunjang seperti ketersediaan kantor administrasi yang representatif, ruang belajar, perpustakaan, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, mobiler dan fasilitas penunjang proses belajar mengajar lainnya.

e. Kualitas santri

Kualitas teungku yang relatif terbatas baik dalam penguasaan ilmu pengetahuan, wawasan dan metode pengajar, berdampak secara signifikan terhadap kualitas murid. Untuk itu, perlu peningkatan kemampuan kompetensi melalui berbagai pelatihan jangka pendek agar kualitas murid mengalami peningkatan

f. Hubungan Dayah dengan Dunia Luar

Dayah mempunyai hubungan yang sangat terbatas dengan dayah lainnya sehingga kerjasama antara dayah yang satu dengan dayah lainnya pun terbatas. Padahal dengan kerjasama antar dayah akan menimbulkan efisiensi dan sinergisitas pertumbuhan dayah sehingga dayah berkembang sejalan dengan tuntutan zaman.

g. Dana

Dayah merupakan lembaga yang belum mempunyai aturan yang jelas, transparan dan akuntabel dalam pengalokasian dana. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan sumber dana tetap. Keuangan dayah erat hubungannya dengan keuangan pimpinan dayah dan untuk kelancaran proses belajar mengajar dayah di danai dari keuanganmurid yang pas-pasan. Kondisi seperti ini member dampak kurang baik dan tidak menguntungkan bagi kelangsungan lembaga pendidikan dayah, dan untuk meningkatkan

kesejahteraan para tenaga pendidikan dan kependidikan yang terukur jumlahnya (sesuai dengan kebutuhan dayah).

3.4. Telaahan Visi dan Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;

Visi Pemerintah Aceh :

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, transparan, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu tolok ukurnya adalah perencanaan yang sistematis, sebab saat ini hampir disemua negara sudah menerapkan system perencanaan yang strategis, dikenal dengan Rencana Strategis (Renstra).

Sejalan dengan itu, penyusunan Renstra dilakukan sebagai tindak lanjut Ketetapan MPR – RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme, serta UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut penjelasan pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, disebutkan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Operasionalisasi kegiatan kelembagaan selama 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) harus diimplementasikan setiap tahun melalui Rencana Kinerja (Renja). Dinas/Badan/Lembaga yang ada dilingkungan Pemerintah Aceh harus menyusun Renstra yang berpedoman kepada Renstra Pemerintah Aceh dengan memperhatikan Visi dan Misi Gubernur/wakil terpilih Periode 2012-2017. Sesuai dengan visi Pemerintah Aceh 2012-2017 yaitu **“Aceh Yang Bermartabat Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintah Aceh sebagai wujud MoU Helsinki”**. Bertitik tolak dari visi tersebut Dinas Pendidikan Dayah Aceh telah merumuskan Visi 2012-2017 yaitu **”Terwujudnya Dayah Sebagai Lembaga Pendidikan & Pembinaan Mampu Melahirkan Generasi Muda Berkualitas**

dan Islami”. Dengan visi ini diharapkan Dinas Pendidikan Dayah Aceh mampu membina Dayah untuk melahirkan Generasi Muda berkualitas dan memiliki daya saing dengan generasi muda Indonesia lainnya dan memiliki keimanan dan ketaqwaan sesuai dengan ajaran Islam.

Tabel II.6
Penempatan Wilayah Pengembangan (WP)

NO	Wilayah Pengembangan (WP)	Pusat Kegiatan	Kabupaten/Kota yang Tercakup	Luas WP (Ha)
1	2	3	4	5
1	Banda Aceh dan sekitarnya			
	WP Basajan (Banda Aceh-Sabang_Jantho)	PKNp Banda Aceh PKW/PKSN Sabang PKL Jantho	Kota Banda Aceh Kota Sabang Kab. Aceh Besar	-
2	Pesisir Timur			
	WP Timur 1 (Langsa-Kuala Simpang-Idi Rayeuk)	PKW Langsa PKL Ka. Simpang-Kr Baru PKL Idi Rayeuk	Kota Langsa Kab. Aceh Utara Kab. Bireuen	-
	WP Timur 2 (Lhokseumawe-Bireuen-Lhok Sukon)	PKN Lhokseumawe PKL Bireuen PKL Lhok Sukon	Kota Lhokseumawe Kab. Bireuen Kab. Aceh Utara	146,900.00
	WP Timur 3 (Sigli-Meureudu)	Kab. Pidie Kab. Pidie jaya	Kab. Pidie Kab. Pidie Jaya	157,050.00
3	Pegunungan Tengah			
	WP Tengah 1 (Takengon-Sp. Tiga Redelong)	PKW Takengon PKL Sp. Tiga Redelong	Kab. Aceh Tengah Kab. Bener Meriah	140,800.00
	WP Tengah 2 (Kutacane-Blangkejeren)	PKL Kutacane PKL Blangkejeren	Kab. Aceh Tengah Kab. Gayo Lues	290,701.32
4	Pesisir Barat			
	WP Barat 1 (Meulaboh-Calang_Suka Mak-mue)	PKW Meulaboh PKL Calang PKWp Jeuram-Suka Mamue	Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Jaya Kab. Nagan Raya	351,832.53
	WP Barat 2 (Tapaktuan-Blangpidie)	PKL Tapaktuan PKWp Blangpidie	Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Barat Daya	291,650.00
	WP Barat 3 (Subulussalam-Singkil)	PKWp Subulussalam PKL Singkil	Kota Subulussalam Kab. Aceh Singkil	84,862.90
	WP Barat 4 (Sinabang)	Sinabang	Kab. Simeulue	11.37

Sumber : Bappeda Aceh (RTRWA,), 2010

Demikian juga dengan rencana penetapan kegiatan unggulan pada kawasan budidaya lainnya sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Penetapan Kawasan Unggulan pada Kawasan Budidaya Lainnya Dalam Kawasan Andalan Aceh – WP (KAA-WP)

No	Kawasan Andalan Aceh-WP (KAA-WP)	Kabupaten/Kota yang Tercakup	Luas KAA-WP (Ha)	Luas Kaw. Lindung (Ha)	Luas Kaw. Bud Strat. Aceh (Ha)	Luas Kaw. Bud. Lain (Ha)	Kegiatan Unggulan Pada Kaw. Bud. Lainnya
1.	Kawasan Andalan Aceh - WP Basajan (Banda Aceh-Sabang-Jantho)	Kota Banda Aceh Kota Sabang Kab. Aceh Besar	308.088,00	156.166,60	50.919,40	62.953,60	- Permukiman Perkotaan - Permukiman Perdesaan - Pertanian - Pariwisata - Industri - Perikanan
2.	Kawasan Andalan Aceh - WP Timur 1 (Langsa-Kuala Simpang-Idi Rayeuk)	Kota Langsa Kab. Aceh Tamiang Kab. Aceh Timur	775.002,60	432.431,90	31.934,04	298.155,96	- Permukiman Perkotaan - Permukiman Perdesaan - Perkebunan - Pertanian - Industri - Perikanan - Pertambangan
3.	Kawasan Andalan Aceh-WP Timur 2 (Lhokseumawe-Bireuen-Lhoksukon)	Kota Lhokseumawe Kab. Aceh Utara Kab. Bireuen	464.440,37	137.762,70	52.327,13	269.612,87	- Permukiman Perkotaan - Permukiman Perdesaan - Perkebunan - Pertanian - Industri - Perikanan - Pertambangan
4.	Kawasan Andalan Aceh-WP Timur 3 (Sigli-Meureudu)	Kab. Pidie Kab. Pidie Jaya	411.718,18	267.670,09	51.376,97	65.513,03	- Permukiman Perkotaan - Permukiman Perdesaan - Perkebunan - Pertanian - Industri - Perikanan - Pertambangan
5.	Kawasan Andalan Aceh-WP Tengah 1 (Takengon-Sp. Redelong)	Kab. Aceh Tengah Kab. Bener Meriah	635.804,69	459.753,21	5.200,00	59.930,00	- Permukiman Perkotaan - Permukiman Perdesaan - Perkebunan - Pariwisata - Perikanan
6.	Kawasan Andalan Aceh-WP Tengah 2	Kab. Aceh Tenggara	971.953,52	873.350,00	35.657,54	29.472,46	- Permukiman Perkotaan

No	Kawasan Andalan Aceh-WP (KAA)	Kabupaten/Kota yang Tersebut	Luas KAA-WP (Ha)	Luas Kaw. Lindung	Luas Kaw. Bud. Strat.	Luas Kaw. Bud. Leis.	Kegiatan Penggunaan
	(Kutacane- Blangkejeren)	Kab. Gayo Lues					- Permukiman Perdesaan - Perkebunan - Pariwisata - Pertanian
7.	Kawasan Andalan Aceh-WP Barat 1 (Meulaboh-Calang- Suka Makmue)	Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Tengah Kab. Nagan Raya	1.018.069,37	702.493,32	31.868,36	276.981,64	- Permukiman Perkotaan - Permukiman Perdesaan - Perkebunan - Pertanian - Pariwisata - Perikanan - Pertambangan
8.	Kawasan Andalan Aceh-WP Barat 2 (Tapaktuan- Blangpidie)	Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Barat Daya	605.863,89	535.690,00	21.896,35	38.243,65	- Permukiman Perkotaan - Permukiman Perdesaan - Perkebunan - Pertanian - Pariwisata - Perikanan
9.	Kawasan Andalan Aceh-WP Barat 3 (Subulussalam- Singkil)	Kota Subulussalam Kab. Aceh Singkil	302.158,51	390.073,00	7.867,86	107.542,14	- Permukiman Perkotaan - Permukiman Perdesaan - Perkebunan - Pariwisata - Perikanan
10.	Kawasan Andalan Aceh-WP Barat 4 (Sinabangl)	Kab. Simuelue	182.721,93	121.752,10	3.085,00	50.685,00	- Permukiman Perkotaan - Permukiman Perdesaan - Perkebunan - Perikanan - Pariwisata

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Analisis SWOT (Kekuatan,Kelemahan,Peluang dan Ancaman)

a. Lingkungan Internal Dinas Pendidikan Dayah Aceh

1) Kekuatan (*Strengths*) :

- Mayoritas Penduduk Aceh beragama Islam.
- Banyaknya Dayah/Pesantren/TPA/Balai Pengajian/TPQ/LPI yang tersebar di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh
- Visi dan misi Pemerintah Aceh.

2) Kelemahan (*Weakness*) :

- Belum adanya Kurikulum yang baku
- Keterbatasan jumlah dan mutu tenaga pengajar.
- Pengelolaan manajemen dayah yang tradisional.
- Kurangnya dukungan sarana dan fasilitas dayah.
- Terbatasnya jumlah mutu santri yang dihasilkan.
- Terbatasnya hubungan dayah dengan dunia luar.
- Terbatasnya dana operasional dayah..

b. Lingkungan Eksternal Dinas Pendidikan Dayah Aceh

1) Peluang (*Opportunities*) :

- Tingginya perhatian Pemerintah Aceh terhadap pelaksanaan Syariat Islam;
- Hubungan dan pola pembinaan yang baik dengan Kabupaten/Kota serta instansi pembina (Dinas

Pendidikan Dayah Aceh) dalam pembinaan Dayah/Pesantren/TPA/Balai Pengajian/TPQ/LPI;

- Perubahan Paradigma masyarakat Aceh yang lebih memilih menyekolahkan anak ke Dayah/Pesantren/TPA/Balai Pengajian/TPQ/LPI;
- Adanya keinginan untuk melahirkan kurikulum Dayah/Pesantren/TPA/Balai Pengajian/TPQ/LPI;
- Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ;

2) Ancaman (*Threats*) :

- Infrastruktur Dayah/Pesantren/TPA/Balai Pengajian/TPQ/LPI yang belum semuanya baik dan memenuhi standar sebagai sebuah lembaga pendidikan;
- Sanitasi Dayah/Pesantren/TPA/Balai Pengajian/TPQ/LPI yang masih kurang bagus

ANALISIS SWOT

ALE ALI	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	- Mayoritas Penduduk Aceh beragama Islam. - Banyaknya Dayah/Pesantren/TPA/Balai Pengajian/TPQ/LPI yang tersebar di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh - Visi dan misi Pemerintah Aceh.	- Belum adanya kurikulum yang baku - Keterbatasan jumlah mutu dan tenaga pengajar - Pengelolaan Manajemen dayah yang masih tradisional - kurangnya sarana dan prasarana dayah - Terbatasnya jumlah mutu santri yang dihasilkan
PELUANG (O)	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
- Tingginya perhatian Pemerintah Aceh terhadap pelaksanaan Syariat Islam; - Hubungan dan pola pembinaan yang baik dengan Kabupaten/Kota serta instansi pembina (Dinas Pendidikan Dayah Aceh) dalam pembinaan Dayah/Pesantren/ TPA/Balai Pengajian/TPQ/LPI; - Perubahan Paradigma masyarakat Aceh yang lebih memilih menyekolahkan anak ke Dayah/Pesantren/TPA/Balai Pengajian/ TPQ/LPI; - Adanya upaya untuk melahirkan kurikulum Dayah/ Pesantren/ TPA/Balai Pengajian/TPQ/LPI; - Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	- Memanfaatkan berbagai potensi masyarakat Aceh untuk memaksimalkan pelaksanaan syariat Islam - Memanfaatkan jaringan network dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan pengembangan Dayah/Pesantren/TPA/Balai Pengajian/TPQ/LPI - Memanfaatkan perubahan paradigm masyarakat Aceh untuk memacu kemajuan Dayah/Pesantren/TPA/Balai Pengajian/TPQ/LPI - Memanfaatkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 dan visi dan misi Pemerintah Aceh untuk mengembangkan Dayah/Pesantren/TPA/Balai Pengajian/TPQ/LPI.	- Memanfaatkan peluang untuk melahirkan kurikulum Dayah/Pesantren/TPA/Balai Pengajian/TPQ/LPI - Memanfaatkan hubungan dgn Kab/Kota untuk mengatasi jumlah dan kualitas tenaga pengajar - Memanfaatkan perhatian Pemerintah Aceh memenuhi keterbatasan sarana dan prasarana - Memaksimalkan Dayah/ Pesantren/ TPA/Balai Pengajian/TPQ/LPI untuk meningkatkan jumlah alumni dan mutu santri;
ANCAMAN (T)	STRATEGI S-T	STRATEGI W-T
- Insfrastruktur Dayah/Pesantren/TPA/Balai Pengajian/TPQ/LPI yang belum semuanya baik dan memenuhi standar sebagai sebuah lembaga pendidikan - Sanitasi Dayah/Pesantren/TPA/Balai Pengajian/TPQ/LPI yang masih kurang bagus	- Mengusahakan keterlibatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan insfrastruktur Dayah/Pesantren/TPA/Balai Pengajian/TPQ/LPI. - Mengusahakan perbaikan Sanitasi Dayah/Pesantren/TPA/Balai Pengajian/TPQ/LPI.	- Memaksimalkan insfrastruktur yang ada dan menggunakan dan memperbaiki kurikulum yang ada - Mempebaiki sanitasi dayah/pesantren/TPA/Balai Pengajian/TPQ/LPI

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. VISI DAN MISI.

Dalam rangka mengisi Otonomi Khusus Dinas Pendidikan Dayah Aceh, telah menetapkan VISI dan MISI Dinas Pendidikan Dayah.

VISI Dinas Pendidikan Dayah Aceh yaitu: ***“Terwujudnya Dayah Sebagai Lembaga Pendidikan Dan Pembinaan Yang Mampu Melahirkan Generasi Muda Berkualitas dan Islami”***.

Untuk mewujudkan **VISI** tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan yang ada, Dinas Pendidikan Dayah Aceh telah menetapkan **MISI** yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan Dayah melalui Pembinaan Tenaga Pendidik, Kurikulum, Prasarana dan Sarana, Manajemen dan Pendanaan.
- b. Meningkatkan peran Dayah dalam mewariskan Ilmu dan Tamadun Islam dalam Rangka Membangun Masyarakat Madani.
- c. Mengupayakan pendidikan keterampilan dan kecakapan hidup ***(Maharatul Al-Hayatiyah)***.
- d. Memberdayakan Ekonomi Dayah untuk meningkatkan pendanaan sendiri ***(Self Finance)***.
- e. Menjaga netralitas Dayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- f. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Santri.

2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPA.

Lihat Tabel Terlampir

3. STRATEGI . DAN KEBIJAKAN.

A. STRATEGI.

Untuk pelaksanaan kebijakan pokok tersebut, strategi yang menjadi prioritas antara lain adalah:

1. Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Aksi, Rencana Jangka Panjang, Menengah dan Rencana Tahunan;
2. Menyusun Standar Kurikulum, Pengelolaan, Sarana dan Prasarana Dayah;
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dayah;
4. Melaksanakan Urusan Ketatausahaan;
5. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan dan Petunjuk Teknis Dinas Pembinaan Pendidikan Dayah;
6. Menyiapkan Rancangan Produk Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Dayah;
7. Membina Manajemen Dayah;
8. Memfasilitasi dan Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif Dayah;
9. Mengupayakan Pendidikan Keterampilan dan Kecakapan Hidup **(Maharatul Al-Hayatiyah).**
10. Memfasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik;
11. Mengupayakan Pendidikan Lanjutan bagi Peserta Didik yang berprestasi di Dalam dan Luar Negeri.
12. Membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

13. Melaksanakan Pelayanan Umum di Bidang Pembinaan Pendidikan Dayah.

B. KEBIJAKAN.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan Dayah Aceh menerapkan beberapa cara, diantaranya melalui Penetapan Kebijakan dan Program. Penetapan Kebijakan dimaksud sebagai Pedoman atau Petunjuk.

Langkah-langkah dan upaya untuk pencapaian tujuan dan sasaran dalam menunjang kelancaran dan keterpaduan Program, ditetapkan beberapa kebijakan yang merupakan ketentuan yang telah disepakati, yaitu :

- a. Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Aksi, Rencana Jangka Panjang, Rencana Jangka Menengah dan Rencana Tahunan.
- b. Penyusunan Standar Kurikulum, Pengelolaan, Prasarana dan Sarana Dayah.
- c. Peningkatan Prasarana dan Sarana Dayah.
- d. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan.
- e. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
- f. Penyiapan Rancangan Produk Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Dayah.
- g. Pembinaan Manajemen Dayah.
- h. Penjaringan Bakat dan Minat Peserta Didik.
- i. Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan dan Kecakapan Hidup **(Maharatul Al-Hayatiyah).**

- j. Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Dayah.
- k. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik.
- l. Penyediaan Tenaga Pendidik Bagi Dayah.
- m. Pemberian Fasilitas Pendidikan lanjutan bagi peserta didik yang berprestasi di dalam dan Luar Negeri.
- n. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- o. Peningkatan Pelayanan Umum di Bidang Pembinaan Pendidikan Dayah.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Penyediaan Makanan dan Minuman
- h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- i. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran :

Aktivitas dan kegiatan perkantoran sehari-hari dapat berjalan dengan lancar, aman dan baik serta menjaga efisiensi dalam pelaksanaan tugas sehari.

Indikator Keberhasilan :

Terlaksana dan tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan tugas sehari perkantoran berjalan lancar dan tertib.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pembangunan Gedung Kantor
- b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- d. Pengadaan Mebeleur
- e. Pengadaan Komputer
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- i. Penunjang dan Pembinaan Kelembagaan

Sasaran:

Meningkatnya operasional kantor dan sarana prasarana bagi aparatur dilingkup Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh. Sesuai dengan Dana dan Pagu Anggaran yang tersedia.

Indikator Keberhasilan:

Terlaksananya serta tersedianya operasional kantor dan sarana dan prasarana bagi aparatur dilingkungan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh secara efektif dan efisien.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Sasaran :

Meningkatnya Disiplin dan Kinerja serta Pengetahuan Aparatur dilingkungan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh, melalui

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai dengan Dana dan Pagu Anggaran yang tersedia.

Indikator Keberhasilan :

Terlaksananya dan tersedianya dana kegiatan bimbingan implementasi peraturan perundang-undangan bagi aparatur dilingkungan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh.

4. Program Pendidikan Dayah.

a. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Santri

Sasaran :

Meningkatnya pembinaan terhadap dayah-dayah yang ada di Provinsi Aceh melalui peningkatan alat praktek dan peraga santri, sesuai dengan Dana yang tersedia.

Indikator Keberhasilan :

Terlaksananya pengadaan Alat Praktek dan Peraga Santri yang ada di Provinsi Aceh secara efektif dan efisien.

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah.

a. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah.

Sasaran :

Meningkatnya fasilitas pembangunan baik Sarana dan Prasarana Dayah dalam wilayah Provinsi Aceh, melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja Aceh sesuai dengan pagu Anggaran yang tersedia.

Indikator Keberhasilan :

Terfasilitasinya pembangunan baik sarana dan prasarana Dayah dalam Wilayah Provinsi Aceh secara efektif, efisien dan bermartabat.

6. Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah.

- a. Pembinaan Pimpinan dan Teungku Dayah
- b. Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga pendidik

Sasaran:

Meningkatnya pengetahuan Pimpinan dan Teungku Dayah melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang diberikan, sesuai dengan Dana yang tersedia.

Indikator Keberhasilan :

Terjadinya peningkatan Pengetahuan dan ilmu bagi Pimpinan dan Teungku Dayah setelah mengikuti pembinaan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing.

7. Program Pemberdayaan Santri

- a. Pelatihan *Life Skill* Santri, Jurnalisrik dan Penerbitan Berkala, Majalah / Jurnal Dayah
- b. Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Dayah
- c. Pembinaan Kompetensi/Ekstra Kurikuler Santri
- d. Penyediaan Beasiswa Transisi (anak Yatim/Miskin)
- e. Pembinaan Bakat dan Minat Santri

Sasaran :

Meningkatnya ilmu pengetahuan bagi santri dayah di seluruh Kabupaten/Kota melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan yang diikuti, sesuai dengan Dana yang tersedia

Indikator Keberhasilan :

Terjadinya perubahan terhadap perilaku para santri dayah di seluruh Kabupaten/Kota, setelah mereka mengikuti pendidikan dan pelatihan secara berkala yang efektif dan efisien.

8. Program Pembinaan Manajemen Dayah.

- a. Pelatihan Usaha Kesehatan Dayah
- b. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Dayah.

Sasaran :

Meningkatnya lingkungan yang bersih dan sehat dalam lingkungan dayah dan meningkatnya pengetahuan Pimpinan Dayah dalam mengelola dan memeneg Dayah secara baik dan benar administrasi dan tata kelola manajemen dayah.

Indikator Keberhasilan :

Terjadinya perubahan pola pikir Pimpinan Dayah, untuk memelihara dan meningkatkan lingkungan yang bersih dan sehat, mengelola Administrasi Dayah secara tertib, rapi dan teratur, setelah Pimpinan Dayah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

9. Program Penelitian dan Pengembangan Dayah.

- a. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dayah
- b. Penyusunan Program dan Rencana Teknis
- c. Pemutakhiran Data dan Penyusunan Program

Sasaran :

Meningkatnya pendidikan dayah secara bertahap melalui melalui kegiatan monitoring pembangunan yang dilakukan, evaluasi dan pelaporan

pengembangan, diselaraskan dengan penyusunan program dan rencana teknis dan pemutakhiran data dayah terbaru.

Indikator Keberhasilan :

Dapat mengetahui hambatan dan capaian pada tahapan pelaksanaan pembangunan dayah yang dievaluasi pembangunan. Tersusunnya program dan rencana teknis yang akan dilakukan pada tahun berikutnya, dan dapat diketahui perkembangan data terbaru dayah, sehingga program yang akan diterapkan secara lebih efisien dan efektif.

10. Program Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah.

- a. Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah
- b. Pembinaan dan Peningkatan Mutu Dayah Bertaraf Internasional
- c. Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah Bertaraf Internasional

Sasaran :

Meningkatnya pendidikan dayah Bertaraf Internasional melalui tersedianya jasa pendidik dan tenaga kependidikan dayah, peningkatan mutu dayah, dan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana dayah.

Indikator Keberhasilan :

Terjadinya peningkatan mutu dayah bertaraf internasional, baik secara kelembagaan, prestasi santri dan pengembangan sarana dan prasarana.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPA YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMA

Dalam bidang pendidikan Dayah indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran adalah:

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Maka untuk mengetahui dan menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan pembangunan pendidikan Dayah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi, perlu dilakukan pengukuran kinerja yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas, baik untuk pengukuran kinerja kegiatan maupun pengukuran kinerja sasarnya.

Dalam bidang pendidikan Dayah indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran adalah:

1. Identifikasi dan verifikasi dayah.

- a. Perencanaan anggaran untuk dayah semakin jelas dan tepat sasaran (75%)

- b. Semakin berkembangnya keinginan calon murid untuk belajar di dayah (50%)
- c. Memudahkan pemerintah untuk mengetahui perkembangan dayah (100%)

2. Pembinaan kelembagaan dan Perkembangan Dayah.

- a. Terciptanya sistem manajemen dayah yang akuntabel dan transparan (60%)
- b. Terciptanya profesionalisme penyelenggar dayah di Provinsi Aceh (60%)
- c. Semakin Efektif dan Efisiennya Pengelolaan dayah di Provinsi (60%).

3. Pengembangan Pendidikan Dayah Kejuruan.

- a. Menikatkannya rasa percaya diri Lulusan dayah dengan adanya Kemahiran hidup (50%).
- b. Meningkatnya Kemampuan lulusan dayah dalam menciptakan kesempatan kerja di desa-desa (20%).

4. Pelatihan Pembina Kaligrafi.

- a. Berkembangnya industry kaligrafi di provinsi Aceh (40%).
- b. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap seni kaligrafi (50%).

5. Pelatihan Pembina Kaligrafi.

- a. Semakin Lancarnya proses Penyelenggaraan Manajemen dan Administrasi di dayah (70%).
- b. Mempermudah Pengembangan dayah (80%).
- c. Mempermudah proses akreditasi dayah (80%).

- d. Terciptanya system manajemen dayah yang akuntabel dan transparan (70%).
- e. Terciptanya Profesionalisme penyelenggaraan dayah di Provinsi Aceh (60%).
- f. Semakin efektif dan efisiennya pengelolaan dayah di Provinsi Aceh (60%).

6. Pelatihan Punulisan Arab – Melayu.

- a. Meningkatnya referensi kitab Arab-Melayu (30%).
- b. Adanya transformasi ilmu dari ulama kepada masyarakat melalui penulisan kitab (50%).
- c. Menduniainya ulama local melalui kitab yang ditulis dalam Arab-Melayu (25%).

7. Pelatihan Komputer Untuk Murid/Santri.

- a. Bertambahnya Pengetahuan Santri Terhadap Penguasaan Computer (75%).
- b. Meningkatnya kemampuan dalam Menyingkapi Kemajuan teknologi (60%).
- c. Meningkatnya Keterampilan hidup Murid (50%).

8. Pelatihan Punulisan Arab – Melayu.

- a. Bertambahnya pengetahuan Masyarakat terhadap ilmu agama (40%).
- b. Meningkatnya Proses belajar mengajar (70%).

9. Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah.

- a. Meningkatnya Partisipasi Teungku dan Murid dalam mengikuti Perlombaan penulisan Ilmiah (20%).

- b. Mempercepat Proses Akreditasi dayah (20%).
- c. Berkembangnya kebiasaan membaca di kalangan murid (70%).
- d. Timbulnya kesadaran murid dan pimpinan dayah dalam membangun perpustakaan dayah (60%).

10. Pelatihan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris

- a. Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan teungku dan murid (70%).
- b. Meningkatnya Kemampuan Pimpinan dan murid dayah dalam berkomunikasi dalam bahasa Arab dan Bahasa Inggris (80%).

11. Pelatihan Kompetensi teungku Dayah

- a. Peningkatan kemampuan kognetif, efektif, internalisasi dan aktualisasi murid (70%).

12. Pelatihan *Life Skill*.

- a. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat (10%).
- b. Berkembangnya sentra industry Kecil di desa-desa (10%).
- c. Tumbuhnya unit produksi dayah yang memberikan pendapatan bagi dayah (40%).
- d. Berkembangnya ekonomi rakyat di provinsi Aceh (10%).

13. Pembinaan Kurikulum Dayah.

- 1. Meningkatnya Kualitas Alumni Dayah (60%).

14. Pendidikan Lanjutan Bagi Tgk Dayah Ke Luar Negeri.

- a. Meningkatnya Kualitas lulusan dayah (80%).
- b. Meningkatnya Kemampuan Bersaing lulusan dayah dalam memperoleh pekerjaan (70%).

15. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Murid.

- a. Meningkatkan kegiatan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam masyarakat (60%).
- b. Terciptanya jiwa yang sehat dan pikiran cerdas (90%).

16. Penyebarluasan dan Sosialisasi Program Dayah.

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan program-program dayah (50%).

17. Penyediaan Alat Bantu Proses Belajar Mengajar (PBM) di Dayah.

- a. Tingkat Kemampuan dan Keterampilan alumni dayah Bertambah (60%).

18. Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah.

- a. Meningkatnya Pemahaman murid terhadap agama islam (90%).
- b. Lahirnya Alumni-alumni dayah yang berkualitas (75%).
- c. Bertambahnya Wawasan keilmuan teungku dan Murid (75%).

19. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah di Daerah Perbatasan.

- a. Membendung kegiatan pemurtadan muslim Aceh di kawasan perbatasan Aceh (60%).
- b. Meningkatkan Minat masyarakat Aceh dan luar Aceh untuk menjadi murid dayah (60%).
- c. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat (80%).
- d. Meningkatnya suasana damai di masyarakat perbatasan (90%).

20. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah Kabupaten/Kota.

- a. Meningkatnya Kualitas Alumni Dayah (60%).

21. Legalisasi dan Sertifikasi Kepemilikan Tanah Dayah.

- a. Adanya kekuatan hukum terhadap asset dayah (80%).

- b. Semakin berkembang dan kuatnya Lembaga dayah sebagai institusi penyelenggara pendidikan di Propinsi Aceh (70%).
- c. Memudahkan dalam Mendapatkan bantuan dari berbagai pihak (80%).

22. Akreditasi Dayah.

- a. Bertambahnya pilihan masyarakat dalam pendidikan (50%).
- b. Bertambahnya lulusan dayah pada semua bidang pekerjaan (30%).

23. Bantuan Dana Oprasional Dayah.

- a. Meningkatkan Kualitas proses belajar mengajar di Dayah
- b. Meningkatnya kualitas Teungku dan Alumni dayah

BAB VII

PENUTUP

Sehubungan dengan revisi Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2013-2017 sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017, maka Dinas Pendidikan Dayah Aceh telah menyesuaikan kembali (revisi) Dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2012-2017 dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2012-2017. Perubahan Rencana Strategis dimaksudkan adalah untuk menyesuaikan dengan Perubahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2012-2017 dan Rencana Strategis merupakan acuan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

Demikianlah Rencana Strategis ini disusun semoga menjadi pedoman dalam menyukkseskan pembangunan Aceh Tahun 2017 ini disusun dengan pengharapan dapat tercapai maksud dan tujuannya.

